

LKPD 2025

BAGIAN I: IDENTITAS DAN PROFIL SINGKAT SKPD

Nama SKPD	:	2.15.1.03.0.00.02. - DINAS PERHUBUNGAN
Nama Kepala SKPD	:	YUDI INDRA SYANI, S.Si.T, M.T
Dasar Hukum Pembentukan (SOTK)	:	1. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang 2. Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan 3. Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 77 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perhubungan
Struktur Organisasi	:	1. Kepala Dinas 2. Sekretariat 3. 4 Bidang (Bidang Program, Bidang Angkutan, Bidang Lalu Lintas. Bidang Keselamatan dan Operasional) 4. 4 UPT (UPT Perparkiran, UPT PKB, UPT.PJU, UPT.Angkot)
Jumlah Pegawai	:	PNS : 91 orang PPPK : 99 orang Outsourcing : 100 orang
Program Prioritas/Unggulan	:	1. Progul 5 : Padang Melayani Aktivasi : Peduli "Warga Emas" Pada Sektor Kesehatan, Transportasi, & Pelayanan Publik Kegiatan : Diskon 50% Tarif Trans Padang Untuk Penumpang Lanjut Usia dan Disabilitas Setiap Bulan Ramadhan, Hari Lansia Nasional (setiap 29 Mei); HUT Kota Padang (setiap 07 Agustus); Hari Warga Emas Sedunia (setiap 01 Oktober); dan Hari Disabilitas Nasional (setiap 14 Desember). 2. Progul 6 : Padang Rancak Aktivasi : Transportasi Publik dan Pemberhentian Ramah Warga Kegiatan : Pengoperasian Trans Padang 3. Progul 6 : Padang Rancak Aktivasi : Transportasi Publik dan Pemberhentian Ramah Warga Kegiatan : Penambahan Tempat Pemberhentian Bus Trans Padang 4. Progul 6 : Padang Rancak Aktivasi : Transportasi Publik dan Pemberhentian Ramah Warga Kegiatan : Pengoperasian Feeder Trans Padang
Anggaran Awal 2025	:	Rp. 133.272.206.073,00
Anggaran Perubahan 2025	:	Rp. 150.406.840.741,00
Realisasi 2025	:	Rp. 137.737.593.569,00
%	:	91,58%
Terdiri dari	:	2 Program 18 Kegiatan 53 Sub Kegiatan

BAGIAN II: KINERJA KEUANGAN (LAPORAN REALISASI ANGGARAN / LRA)

No	Uraian (Kelompok/Jenis)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Sisa Anggaran / SILPA (Rp)	Penjelasan / Penyebab SILPA
A.	PENDAPATAN DAERAH					
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	3.393.787.000,00	2.695.378.000,00	79,42	698.409.000,00	<p>1. Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masih adanya beberapa lokasi parkir atau titik parkir yang belum terdata/dikelola. - Masih kurangnya kesadaran pengontrak parkir untuk menjalankan kewajiban membayar retribusi parkir. - Masih kurangnya informasi terkait tarif parkir oleh pengguna layanan parkir. <p>2. Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor (Sewa Mobil Derek Kecil)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perlengkapan penindakan (kunci gembok kendaraan) saat ini dalam kondisi rusak, sehingga tidak bisa dipergunakan untuk melaksanakan penindakan terhadap kendaraan yang melakukan pelanggaran - Kapasitas derek yang di miliki oleh Dishub hanya untuk kendaraan kecil sejumlah 1 kendaraan <p>3. Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masih banyaknya kendaran angkutan barang yang parkir di luar kawasan tempat khusus parkir di luar badan jalan - Masih banyaknya kendaran angkutan barang yang tidak menggunakan fasilitas parkir di kawasan tempat khusus parkir di luar badan jalan - Pelaksanaan pemungutan retribusi masih manual
2.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-	
B.	BELANJA DAERAH					
1.	Belanja Pegawai	14.848.059.987,76	13.623.624.959,00	91,75%	1.224.435.028,76	<p>1. Sisa access</p> <p>2. Gaji PPPK yg dianggarkan pembayarannya di bulan Mei, ternyata dibayarkan di bulan Juli sesuai SK.</p> <p>3. Sesuai Surat Edaran, TPP CPNS yang dibayarkan belum disesuaikan dg kelas jabatan masing² CPNS</p>
2.	Belanja Barang dan Jasa	72.330.164.399,10	68.815.919.353,00	95,14%	3.514.245.046,10	Terkendala proses pengadaan dan efisiensi anggaran
3.	Belanja Modal	11.627.630.949,14	10.316.551.319,00	88,72%	1.311.079.630,14	Terkendala proses pengadaan dan efisiensi anggaran
4.	Belanja Tidak Terduga / Lainnya (51.600.985.405,00	44.981.497.938,00	87,17%	6.619.487.467,00	<p>1. Peremajaan 10 unit Bus Hino 2013 (operator K1 Eksisting) menjadi 10 unit Bus Mitsubishi 2025 yang direncanakan akan beroperasi pada tanggal 10 Desember tahun 2025 namun belum jd beroperasi dengan BOK baru pada tahun 2025.</p> <p>2. Operasional 5 (lima) unit bus pemenang hasil seleksi peremajaan angkutan umum eksisting yang berhimpitan dengan Koridor 1 Trans Padang direncanakan akan dioperasikan oleh PIHAK KEDUA pada bulan November 2025 namun 5 unit bus besar listrik tambahan K1 belum terlaksana.</p>
C.	TOTAL SILPA SKPD	150.406.840.741,00	137.737.593.569,00		12.669.247.172,00	

BAGIAN III: EVALUASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Nama Program / Kegiatan	Indikator Kinerja (Output/Outcome)	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian (%)	Faktor Pendorong / Kendala Lapangan
DINAS PERHUBUNGAN						
(A) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
I Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen - Penyusunan Laporan Perencanaan Dinas	100	
	2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	1 laporan - Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Dinas	100	
II Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	190 orang/bulan	190 orang/bulan - Pembayaran gaji ASN dan PPPK	100	
	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	119 Dokumen	119 Dokumen - Pembayaran honorarium pengelola keuangan	100	
	3	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	2 dokumen	2 dokumen - Penyusunan laporan hasil pemeriksaan	100	
	4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1 laporan	1 laporan - Penyusunan laporan keuangan	100	
III Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah						
	1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 dokumen	3 dokumen - Pembayaran gaji satpam serta tenaga alih daya	100	

No	Nama Program / Kegiatan	Indikator Kinerja (Output/Outcome)	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian (%)	Faktor Pendorong / Kendala Lapangan
	2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 dokumen	1 dokumen - Penyusunan laporan aset	100	
IV Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						
	1	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	2 dokumen	2 dokumen Jumlah dokumen analisa dan pengembangan retribusi daerah, serta penyusunan kebijakan retribusi daerah 1. SK Target PAD 2025 2. Target PAD 2026	100	
V Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
	1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 dokumen	1 dokumen - Pembuatan aplikasi kepegawaian	100	
	2	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	1 dokumen - Rapat Evaluasi Pegawai	100	
VI Administrasi Umum Perangkat Daerah						
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 paket	1 paket - Pengadaan Alat Listrik	100	
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 paket	1 paket - Pengadaan Alat-alat Kantor	100	
	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37 paket	37 paket - Pengadaan Alat Tulis Kantor	100	
	4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8 jenis	8 jenis - Pengadaan Karcis retribusi, fotocopy dan spanduk	100	

No	Nama Program / Kegiatan	Indikator Kinerja (Output/Outcome)	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian (%)	Faktor Pendorong / Kendala Lapangan
	5	Fasilitas Kunjungan Tamu	50 laporan	50 laporan - Makan Minum Tamu	100	
	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 laporan	60 laporan - SPPD luar daerah	100	
	7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	1 dokumen - Rapat penataan arsip	100	
VII Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
	1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11 unit	11 unit - Pengadaan Kendaraan Roda 2 dan Roda 4	100	
	2	Pengadaan Mebel	30 unit	30 unit - Pembelian Meja dan Kursi Kerja	100	
	3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10 unit	10 unit - Pembelian Scanner, Printer, HT, Komputer, Laptop, Tablet dan Notebook	100	
	4	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Gedung Lainnya	2 unit	2 unit - Sewa gedung kantor	100	
	5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 unit	2 unit - Pengadaan AC	100	
	6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10 unit	10 unit - Pembelian Bahan-bahan konstruksi untuk pemeliharaan gedung kantor	100	

No	Nama Program / Kegiatan	Indikator Kinerja (Output/Outcome)	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian (%)	Faktor Pendorong / Kendala Lapangan
VIII Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300 laporan	300 laporan - Pembelian Materai	100	
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	12 laporan - Tagihan Air, Listrik serta Internet	100	
	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 laporan	2 laporan - Biaya Hak Pakai frekuensi radio	100	
	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4 laporan	4 laporan - Pembayaran gaji tenaga honorer/kontrak	100	
IX Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	1 unit - BBM Kendaraan dinas Kadis	100	
	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	62 unit	62 unit - Pajak, kir, serta service kendaraan	100	
	3	Pemeliharaan Mebel	10 unit	10 unit - Pemeliharaan kursi rapat, lemari dan meja	100	

No	Nama Program / Kegiatan	Indikator Kinerja (Output/Outcome)	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian (%)	Faktor Pendorong / Kendala Lapangan
	4	Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya	20 unit	20 unit - Service Komputer, Laptop, HT, Printer dll	100	
	5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	2 unit	2 unit - Rehab gedung kantor	100	
	6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5 unit	5 unit - Pengadaan alat-alat kebersihan - Pemeliharaan Instalasi listrik - Jasa Tenaga Kebersihan 9 orang	100	
	7	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50 unit	50 unit - Service AC dan Genset	100	
(B) PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						
I Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota						
	1	Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	1 dokumen	0 dokumen	0	Tidak jadi dilaksanakan karena untuk Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota ini membutuhkan Belanja Tenaga Ahli, sementara pada saat penyusunan anggaran 2025, anggaran Belanja Tenaga Ahli tersebut dihilangkan (terkena rasionalisasi)
	2	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	1 dokumen	0 dokumen	0	Tidak jadi dilaksanakan karena untuk Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota ini membutuhkan Belanja Tenaga Ahli, sementara pada saat penyusunan anggaran 2025, anggaran Belanja Tenaga Ahli tersebut dihilangkan (terkena rasionalisasi)

No	Nama Program / Kegiatan	Indikator Kinerja (Output/Outcome)	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian (%)	Faktor Pendorong / Kendala Lapangan
II Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota						
	1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan kabupaten Kota	500 unit	500 unit -Pengadaan Lampu PJU	100	
	2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1500 unit	1500 unit - Pemeliharaan dan perawatan lampu PJU	100	
III Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C						
	1	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	1 dokumen	1 dokumen -Pengawasan terminal angkot	100	
IV Penerbitan izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir						
	1	Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten / Kota	1 laporan	1 laporan -Pengawasan dan penertiban parkir tepi jalan umum	100	
V Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						
	1	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4 dokumen	4 dokumen - Pengadaan Tanda Lulus Uji (Smartcard) Pengujian Kendaraan Bermotor (Kartu Uji + Stiker RFID)	100	
	2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2 unit	2 unit - Kalibrasi alat uji PKB	100	

No	Nama Program / Kegiatan	Indikator Kinerja (Output/Outcome)	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian (%)	Faktor Pendorong / Kendala Lapangan
	3	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 laporan	1 laporan - Rapat dengan pihak terkait	100	
VI Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota						
	1	Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan untuk jalan kabupaten / kota	2 laporan	2 laporan - Pengawasan dan penertiban parkir tepi jalan umum - Penderekan - Pengaturan lalu lintas event/acara Kota Padang - Pengaturan lalu lintas hari raya idul fitri dan Nataru	100	
	2	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2 dokumen	2 dokumen - Sosialisasi Juru parkir selama 2 hari sebanyak 150 orang	100	
	3	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten / Kota	1 laporan	1 laporan - 1 kali kegiatan forum lalu lintas	100	
	4	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	2 dokumen	2 dokumen - Komponen Rambu Rambu - Papan Pengumuman - Kanstin Median Jalan - Set-up & Programming - Pengadaan dan Pemasangan Paku Marka - Pemasangan Marka Jalan	100	
	5	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota	2 laporan	1 laporan - Kegiatan rapat-rapat pada Bidang Lalu Lintas dengan pihak terkait	50	

No	Nama Program / Kegiatan	Indikator Kinerja (Output/Outcome)	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian (%)	Faktor Pendorong / Kendala Lapangan
VII Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota						
	1	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	4 laporan	2 laporan - Rapat dengan pihak terkait	50	<p>1. Tidak tersedianya lagi alokasi belanja perjalanan dinas dalam daerah untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan pelaksanaan rekomendasi Andalalin karena sesuai peraturan berlaku (Permenhub Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Andalalin) harus melibatkan 3 instansi (Dinas Perhubungan, Dinas PUPR dan pihak Kepolisian).</p> <p>2. Dengan alokasi anggaran yang tersedia berupa Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas lapangan, perlu dilengkapi dengan Keputusan Walikota yang melibatkan minimal 3 OPD terkait sebagai syarat untuk menjalankannya. Proses pengajuan, koreksi dan persetujuan SK Walikota tentang Tim Monev Andalalin telah dilakukan sejak bulan Agustus pada aplikasi jdih kota padang serta penandatanganan melalui Bagian Hukum. Namun hingga bulan Desember 2025 SK Wako dimaksud belum juga tuntas.</p> <p>3. Kendala pada aplikasi E-Katalog versi 6 (platform pengadaan barang dan jasa pemerintah) sejak awal tahun, dan hanya baru dapat dijalankan mulai akhir bulan September 2025</p>
	2	Penetapan Dokumen Teknis Andalalin	6 laporan	4 laporan -Rapat-rapat pembahasan/asistensi penilaian dokumen Andalalin antara Tim Penilai Andalalin dengan pihak Pemrakarsa dan Konsultan terhadap rencana pembangunan pembangunan/pengembangan pusat kegiatan di dalam wilayah Kota Padang sesuai dengan status jalan dengan kewenangan kota Padang	66,67	
IX Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota						
	1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan / atau barang antar kota 1 Daerah Kabupaten / Kota	65 unit	72 unit •K1 (Pusat Kota - Batas Kota) : 20 Bus •K2 (Pusat Kota - Bungus Tik.Kabung) : 12 Bus •K3 (Pusat Kota - Pusat Pemerintahan) : 10 Bus •K4 (Teluk bayur - Terminal Anak Air) : 10 Bus •K5 (Pusat Kota - Indarung) : 10 Bus •K6 (Pusat Kota - Limau Manis Kampus Unand) : 10 Bus	100	

No	Nama Program / Kegiatan	Indikator Kinerja (Output/Outcome)	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian (%)	Faktor Pendorong / Kendala Lapangan
X	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota					
	1	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 Daerah Kabupaten / Kota	2 dokumen	2 dokumen - Rambu Trans Padang 86 unit - Halte 1 unit	100	

BAGIAN IV: MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP) BPK

No,	Tahun LHP BPK,	Uraian Ringkas Temuan pada SKPD,	Rekomendasi BPK,	Nilai Temuan / Kerugian (Rp),	Status Penyelesaian (1-4),	Keterangan / Bukti Tindak Lanjut
1.	2025	Pembayaran Belanja Honorarium Pengguna Anggaran Tidak Sesuai Peraturan Presiden tentang Standar Harga Satuan Regional sebesar Rp22.635.500,-	<p>BPK merekomendasikan Wali Kota Padang agar :</p> <p>a. Memerintahkan TAPD untuk menyusun Perwako tentang SHS dengan selalu memdomani Perpres tentang Standar Harga Regional</p> <p>b. Memerintahkan Kepala SKPD terkait selaku Pengguna Anggaran untuk :</p> <p>1) Mematuhi ketentuan tentang pembayaran honorarium di lingkungan kerjanya;</p> <p>2) Menginstruksikan PPTK masing-masing SKPD untuk meningkatkan kecermatan dalam melaksanakan perencanaan, pengawasan dan pengujian bukti pertanggungjawaban belanja honor Pengguna Anggaran Di SKPDnya; dan</p> <p>3) Mengembalikan kelebihan pembayaran Honorarium Pengguna Anggaran dan menyetorkan ke RKUD sebesar Rp22.635.500,-</p>	22.635.500,00	Sudah ditindaklanjuti	<p>1. Surat pernyataan Kepala Dinas Perhubungan Nomor: 900/148/Dishub-Pd/2026</p> <p>2. Instruksi Kepala Dinas Perhubungan Kepada PPTK Nomor: 900/147/Dishub-Pd/2026</p> <p>3. Surat Pernyataan PPTK</p> <p>4. Surat Tanda Setoran (STS) Nomor: 0001/STS/BENDAHARAPENGELUARAN/3/2026 ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) tanggal 16 Maret 2026 sebesar Rp22.635.000</p>
2.	2025	Pembayaran Belanja Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp34.485.500,-	<p>BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Padang agar :</p> <p>a. TAPD agar merumuskan besaran honor PPK pada Perwako Kota Padang tentang SHS mengacu kepada Perpres 72 Tahun 2025 dan standarisasi APBN yang diatur melalui PMK</p> <p>b. Memerintahkan Kepala SKPD terkait selaku Pengguna Anggaran untuk :</p> <p>1) Lebih cermat dalam melakukan penyusunan RKA-SKPD, DPA-SKPD, pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan belanja jasa kantor pada satuan kerjanya;</p> <p>2) Menginstruksikan PPTK dan Pelaksana Kegiatan lebih cermat dalam melaksanakan perencanaan, pengawasan dan pengujian bukti pertanggungjawaban honorarium PPK; dan</p> <p>3) Memproses kelebihan pembayaran honorarium PPK dan menyetorkan ke RKUD sebesar Rp34.485.500,-</p>	34.485.500,00	Sudah ditindaklanjuti	<p>1. Surat Pernyataan Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Nomor: 900/146/Dishub-Pd/2026</p> <p>2. Instruksi Kepala Dinas Perhubungan Kepada PPTK Nomor: 900/145/Dishub-Pd/2026</p> <p>3. Surat Pernyataan PPTK</p> <p>4. Surat Tanda Setoran (STS) Nomor: 0002/STS/BENDAHARAPENGELUARAN/4/2026 ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) tanggal 6 April 2026 sebesar Rp34.485.500</p>

No,	Tahun LHP BPK,	Uraian Ringkas Temuan pada SKPD,	Rekomendasi BPK,	Nilai Temuan / Kerugian (Rp),	Status Penyelesaian (1-4),	Keterangan / Bukti Tindak Lanjut
3.	2025	Pembayaran Belanja Subsidi Trans Padang Tahun 2025 Melebihi Ketentuan Sebesar Rp5.291.776.842,51	<p>BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Padang agar :</p> <p>a. Menerbitkan Keputusan Wali Kota sebagai KPM yang mengatur presentase laba untuk operator yang wajar sesuai ketentuan;</p> <p>b. Memerintahkan:</p> <p>1) Tim Verifikasi Usulan Subsidi sebagai pihak yang menyusun BOK untuk penganggaran subsidi Trans Padang, untuk:</p> <p>a) Mengusulkan anggaran pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) yang harus dilaksanakan setiap tahun sebelum penganggaran subsidi Trans Padang sesuai Perwako Nomor 128 Tahun 2021;</p> <p>b) Menggunakan hasil pemeriksaan BPK atas Belanja Subsidi pada pemeriksaan atas PDTT kepatuhan pelaksanaan Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, dan Belanja Modal TA 2025 untuk menganggarkan Belanja Subsidi Trans Padang TA 2026</p> <p>2) Kepala Dinas Perhubungan untuk lebih cermat dalam mengawasi pemberian subsidi Trans Padang;</p> <p>3) TAPD untuk memperhitungkan dan memotong anggaran subsidi Tahun anggaran berikutnya sebesar Rp5.291.776.842,51, dengan rincian pada masing-masing operator minimal sebagai berikut:</p> <p>a)Koridor 1 sebesar Rp1.001.291.944,54;</p> <p>b)Koridor 2 sebesar Rp1.247.243.559,91</p> <p>c)Koridor 3 sebesar Rp748.475.211,90</p> <p>d)Koridor 4 sebesar Rp1.092.132.670,05</p> <p>e)Koridor 5 sebesar Rp538.985.309,18; dan</p> <p>f)Koridor 6 sebesar Rp663.720.146,93</p> <p>4) Direktur Perumda Padang Sejahtera Mandiri untuk:</p> <p>a) Meningkatkan kecermatan dalam mengelola dan mengawasi operasional Divisi Trans Padang</p> <p>b) Mencantumkan klausul tentang kewajiban operator memberikan bukti pertanggungjawaban setiap triwulan dalam kontrak kerjasama dengan operator</p> <p>c) Menginstruksikan Kepala Divisi Trans Padang agar :</p> <p>(1) Menjalankan kewajibannya dalam mengawasi penggunaan subsidi Trans Padang oleh masing-masing operator; dan</p> <p>(2) Menugaskan koordinator lapangan masing-masing koridor untuk memeriksa setiap pengeluaran operator secara berkala.</p>	5.291.778.842,51	Sudah ditindaklanjuti	<p>1. Surat Pernyataan Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Nomor: 900/157/Dishub-Pd/2026</p> <p>2. Berita Acara Kesepakatan Rencana Pencairan Subsidi Trans Padang Triwulan 1 2026 terkait pemotongan pembayaran beban jasa operator Trans Padang pada Triwulan 1 2026 sebesar Rp440.981.403,54</p> <p>3. Berita Acara Kesepakatan Rencana Pencairan Subsidi Trans Padang Triwulan 2 2026 terkait pemotongan pembayaran beban jasa operator Trans Padang pada Triwulan 2 2026 sebesar Rp440.981.403,54</p>

BAGIAN V: REKAPITULASI POSISI ASET TETAP (BARANG MILIK DAERAH)

No	Kelompok Aset Tetap	Total Nilai Aset / Neraca (Rp)	Kondisi Baik (Jumlah/Unit)	Kondisi Rusak Berat (Jumlah/Unit)	Keterangan (Status/Sengketa/Usulan)
1.	Tanah	7.853.396.405,00	4	-	
2.	Peralatan dan Mesin	114.336.550.193,59	7637	-	
3.	Gedung dan Bangunan	12.589.219.667,77	129	-	
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	30.884.272.748,31	505	-	
5.	Aset tetap lainnya	44.344.000,00	1	-	
6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	945.615.717,50	41	-	
7.	Aset Tidak Berwujud	1.010.930.711,40	13	-	
TOTAL NILAI ASET SKPD		167.664.329.443,57			

Padang, Juni 2026
Kepala Dinas Perhubungan
Kota Padang

Yudi Indra Syani S.SiT, M.T
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.197306241996021001